

PERWUJUDAN KEPEMIMPINAN PANCASILA OLEH GURU PKn UNTUK MEMBENTUK DISIPLIN SISWA SMA NEGERI 2 SINTANG

Ananias Jeni

SMA Negeri 2 Sintang Jl. MT. Haryono

Email :Ananias_jeni@yahoo.com

Abstract

This study aims to realize the Pancasila leadership by Civics Teachers to shape students' discipline in SMA Sintang 2 especially for the XII IPA class 2 Academic Year 2017/2018. class XII IPA 2 SMA Sintang 2. The problem faced by teachers is to shape student discipline in realizing Pancasila leadership. The pemasanasan that will be developed is the realization of Pancasila leadership by Civics teachers to form student discipline. This research was conducted in class XII IPA 2 Sintang 2 State Senior High School using descriptive method to solve problems faced by students.

Keywords: Embodiment of Leadership, Pancasila, Civics Teachers, Forming Discipline

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan kepemimpinan Pancasila oleh guru PKn untuk membentuk disiplin siswa pada SMA Negeri 2 Sintang khususnya bagi kelas XII IPA 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perwujudan kepemimpinan pancasila oleh gurupendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk disiplin siswa kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Sintang. Adapun masalah yang dihadapi guru adalah membentuk disiplin siswa dalam mewujudkan kepemimpinan pancasila. Adapun pembahasan yang akan dikembangkan adalah perwujudan kepemimpinan Pancasila oleh guru PKn untuk membentuk disiplin siswa. Penelitian ini dilakukan pada kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Sintang dengan menggunakan metode diskriptif untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa

Kata Kunci: Perwujudan Kepemimpinan, Pancasila, Guru PKn, Membentuk Disiplin

A. Pendahuluan

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar dikalangan masyarakat harus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif dan keinginan untuk maju. Sejalan dengan usaha tersebut, fungsi sekolah perlu dipertegas dan diperjelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Peran dan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial, bisa disebut juga sebagai suatu organisasi yaitu terikat pada tata aturan formal, berprogram dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan yang resmi. Pada akhirnya fungsi sekolah terikat pada sasaran yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Di sekolah diajarkan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya itu saja, di dalam sekolah individu dilatih untuk mempraktikan hal-hal yang telah ia pelajari di sekolah dan keluarga (Suwarno pendidikan rosde blogspot.com. 2018/04).

Pengkajian tentang perwujudan kepemimpinan pancasila oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk disiplin sekolah merupakan pengkajian tentang peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dihaapkan menghasilkan warga negara yang pancasilais serta mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa didalam kebhinnekaannya. Pendidikan sebagai suatu usaha mendasar dalam mempersiapkan generasi penerus maka untuk itu diperlukan kepemimpinan guru mata pelajaran khususnya Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membina watak, serta dengan mewujudkan cita-cita bangsa. Ilmu pengetahuan dipergunakan sebagai sandaran untuk melaksanakan tugas pendidikan sedangkan pengalaman berperan untuk tidak mengulangi kesalahpahaman dan bermanfaat untuk mengembangkan kegiatan yang dipandang positif. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis (UU. No. 20 tahun 2003).

Perwujudan cita-cita tersebut sangat tergantung pada kepemimpinan guru yang merupakan teladan bagi siswa. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi yang strategis dalam dunia pendidikan dan didalam masyarakat. Oleh sebab itu Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dituntut untuk memiliki kepemimpinan, sikap dan kepribadian yang mencerminkan ke lima sila Pancasila.

B. Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk memberikan kejelasan kepada siswa tentang pembentukan disiplin, memberikan informasi bagaimana Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sumber belajar, serta memberikan kejelasan tentang relevansi perwujudan kepemimpinan Pancasila untuk

membentuk disiplin siswa dan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hubungan antara perwujudan kepemimpinan Pancasila oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk disiplin siswa. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam kehidupan manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya (Kaelen, 2014:102).

C. Metode

Penelitian ini bermaksud untuk mengemukakan perwujudan kepemimpinan Pancasila oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk disiplin siswa pada SMA Negeri 2 Sintang. Karena itu dipergunakan metode diskriptif. Maksud dengan menggunakan metode diskriptif ini adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa serta untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara masalah yang diselidiki. Artinya, dengan adanya metode berguna untuk menjelaskan fakta sistematis fakta-fakta dan karakteristik terhadap populasi yang diberikan atau sasaran yang ingin dicapai.

Jadi penggunaan metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pengukuran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nohir, 1988:63).

D. Hasil dan Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan ini tentang perwujudan kepemimpinan pancasila oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk disiplin siswa pada SMA Negeri 2 Sintang, kepemimpinan yang berdasarkan pancasila oleh team pembina penataran dan bahan penataran pegawai republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Yang Berdasarkan Pancasila

Kepemimpinan Yang Berdasarkan Pancasila yaitu kepemimpinan yang memiliki jiwa pancasila yang memiliki wibawa dan daya mampu untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya kedalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (1981:44).

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, melalui Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pemimpin pendidikan harus memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memberikan teladan, mempengaruhi, mengerakan, membimbing siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang bersumberkan pancasila sebagai pandangan hidup. Perwujudan kepemimpinan pancasila oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk disiplin siswa pada SMA Negeri 2 Sintang

diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki pengetahuan dan berkepribadian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Sekolah Sebagai Tempat Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar

Sekolah Sebagai Tempat Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar menemukan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini berarti bahwa sekolah merupakan lembaga formal pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan manusia pancasilais yang memiliki sikap, kepribadian, pengetahuan kecapakan dan ketrampilan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membangun untuk mencapai sasaran pendidikan tersebut, maka diperlukan kepemimpinan yang dapat mewujudkan kepemimpinan pancasila. Perwujudan kepemimpinan

yang berdasarkan pancasila dapat dilihat dari sikap dan prilaku warga sekolah.

Menurut team pembina penataran mengemukakan kepemimpinan yang berdasarkan pancasila adalah kepemimpinan yang memiliki jiwa pancasila, yang memiliki wibawa dan daya mampu untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya kedalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dengan demikian seorang pemimpin harus memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pancasila bersikap konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkannya, serta harus membawa dalam mempengaruhi masyarakat lingkungannya dan harus mempunyai semangat kekeluargaan, untuk mendorong, menuntun dan memberikan teladan bagi masyarakat lingkungannya.

3. Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan Formal

Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan Formal dapat

mewujudkan peranannya, perlu dilindungi dan diamankan dari segala macam pengaruh negatif seperti kegiatan politik praktis, kegiatan lain yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sekolah sebagai wadah guru dan siswa yang sekaligus mempunyai tugas dan penranannya menyelenggarakan proses pendidikan. Pendidikan itu sendiri berperan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu pendidikan dan martabat manusia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta

dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

4. Guru sebagai fasilitator

Guru sebagai fasilitator atas dasar hal tersebut maka melalui Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai fasilitator diharapkan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan menyediakan, mengatur memelihara dan melengkapi apa yang menjadik kepentingan siswa. Titik penekanan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai fasilitator yaitu harus mampu membangkitkan swakarya dan kreasi dari orang-orang yang berada dilingkungan sekolahnya, serta harus mampu mendorong siswa untuk berkarya, berkompetisi, berdaya saing serta memiliki tanggung jawab.

Pendidikan dalam arti luas memiliki pengertian mendidik, mengajar dan melatih tiga aspek ini pada hakekatnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan karena masing-masing memiliki fungsi tertentu dan mengarahkan

pada pembentukan kepribadian peserta didik. Mendidik lebih tertuju kepada pengembangan aspek-aspek moral, agama dan segi-segi kepribadian seperti sikap, tingkah laku untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tugas sebagai supervisor. Memerlukan pengetahuan dasar dan ketrampilan dalam menunjang pelaksanaan tugas mengajar.

Apabila dihubungkan dengan kemampuan atau potensi profesionalisme keguruannya, maka hal-hal yang hakiki dari kegiatan pendidik merupakan usaha yang lebih ditujukan untuk pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketaqwaan sebagai upaya mengangkat citra dan martabat kemanusiaan peserta didik. Kegiatan mengajar lebih memusatkan sasaran pada penugasan ilmu pengetahuan serta peningkatan kecerdasan peserta didik. Mengembangkan dan mempertajam kemampuan

peserta didik, menganalisis suatu masalah, mencari hubungan semua fakta yang dihadapi, mencari dan menemukan serta mengumpulkan alasan dan pertimbangan dan akhirnya menarik suatu kesimpulan secara logis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi peserta didik karena itu oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) perlu melakukan supervisor untuk mengetahui tingkat perkembangan kepribadian maupun prestasi akademiknya.

5. Guru Sebagai Motivator

Guru Sebagai Motivator selain itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dituntut juga untuk mampu sebagai motivator yang berperan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di sekolah serta membentuk disiplin siswa, perlu memberikan dorongan agar terciptanya disiplin pada diri siswa sehingga sekolah yang tertib, aman dan teratur merupakan prasyarat agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat

terjadi jika disiplin siswa di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat ditumbuhkan, jika iklim sekolah menunjukkan kedisiplinan. Jika situasi sekolah disiplin, siswa akan ikut disiplin.

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai motivator harus dapat membina tata hubungan dan komunikasi yang baik antar orang-orang yang ada di lingkungannya, sehingga tercipta situasi akrab antara guru dan siswa. Hasil belajar ditentukan antara lain oleh gabungan antara kemampuan dasar siswa dan kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan ditentukan oleh motivasi yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat penting menumbuhkan motivasi belajar siswa. Siswa akan termotivasi jika siswa yakin bahwa apa yang dipelajarinya bermanfaat bagi dirinya, yakin akan kemampuan memahami atau menguasai pelajaran tersebut serta situasi belajar yang menyenangkan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka semua upaya pendidikan perlu disesuaikan dengan Undang-undang tersebut. Perwujudan sikap untuk membentuk disiplin sekolah dan siswa tidak terlepas dari tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu berupaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki arti penting dalam rangka pembinaan dan pembentukan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang berada pada Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tinggi oleh karena

itu perwujudan sikap untuk membentuk. Disiplin sekolah dan siswa dilakukan melalui kelima Sila Pancasila yaitu:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa perwujudan sikap dengan cara percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat-menghormati dan berkerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan, hiduh saling menghormati kebeban menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan tidak melaksanakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Karena itu pendidikan kewarganegaraan (PKn) dituntut agar memiliki keyakinan beragama, beriman dan bertaqwa dengan teguh terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

kesadaran demikian dapat menimbulkan pengertian bahwa setiap insan Indonesia mempunyai kedudukan yang sama tinggi dihadapan Tuhan. Kesadaran beragama dan beriman akan dapat menimbulkan kasih sayang, hormat-menghormati dan penghargaan terhadap orang-orang yang ada dilingkungannya untuk bebas beribadah.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap

Melalui Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap mengharuskan kita untuk mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan serta bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan berkerja sama

dengan bangsa lain. Perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab oleh pendidikan kewarganegaraan (PKn) harus dapat menumbuhkan sikap, bagi bagi dirinya maupun bagi orang lain yang ada dilingkungannya untuk tidak bertindak sewenang-wenang, tanpa ada diskriminasi dan mampu melakukan kegiatan kemanusiaan maupun berkerja sama dengan orang lain.

Sila Persatuan Indonesia

Perwujudan melalui Sila Persatuan Indonesia dengan mempertahankan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tungga Ika. Karena itu guru pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan persatuan Indonesia harus dapat menyakini dirinya maupun orang-orang yang ada dilingkungannya untuk menumbuhkan rasa patriotism

dan nasionalisme serta menempatkan perstuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan golongan.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Kemudian perwujudan Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta musyawarah dilakukan dengan akan sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perwujudan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberikan pertolongan, menjauhi sikap pemerasan, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka berkerja keras, menghargai hasil kerja orang lain dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Perwujudan Sikap Untuk Membentuk Disiplin Sekolah

Perwujudan Sikap Untuk Membentuk Disiplin Sekolah, merupakan bagian yang menjadi tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan paradigma barunya yaitu

mengembangkan pendidikan demokrasi yang meliputi, pengembangan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab dan mendorong berpartisipasi warga negara, kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik, bukan hanya dalam deminsi nasional, melainkan juga dalam demensi spiritual, emosional dan sosial sehingga paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bercirikan multidimensional.

Untuk mengembangkan dan mewujudkan sikap disiplin sekolah dapat dilakukan melalui penyusunan rancangan yang melibatkan guru, staf administrasi, wakil dari siswa dan wakil dari orang tua siswa. Dengan keikutsertaan mereka menyusun, diharapkan mereka merasa bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaanya, rancangan harus sesuai deng visi dan misi sekolah, artinya disiplin yang dirancang harus dijabarkan dari visi sekolah rancangan harus singkat dan jelas, sehingga

mudah dipahami, jika rancangan cukup panjang perlu dibuat rangkumannya, rancangan harus memuat secara jelas daftar perilaku yang dilarang beserta sanksinya. Sanksi yang diterapkan harus bersifat mendidik dan telah disepakati bersama.

Kemudian peraturan yang telah disepakati bersama harus disebarluaskan misalnya melalui rapat, surat pemberitahuan dan mejalah sekolah dan kegiatan yang terkait dengan aktivitas siswa harus diarahkan dalam pembentukan disiplin sekolah. Karena itu tata tertib sekolah disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap siswa, guru dan karyawan. Dalam tata tertib sekolah dikemukakan hal-hal yang diharuskan, dianjurkan dan yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Selain itu dalam tata tertib ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Hukuman adalah alat pendidikan yang terakhir apabila cara lain tidak

berhasil. Namun demikian dalam memberikan hukuman perkembangan siswa diupayakan tidak merugikan. Pengembalian siswa kepada orang tua harus dipandang sebagai upaya yang penting akhir yang hanya dilakukan apabila upaya lain tidak berhasil untuk memperbaiki keadaan.

Perwujudan Sikap membentuk disiplin siswa

Guru memiliki tugas profesional yaitu mendidik dalam rangka mengembangkan kepribadian, mengajar dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir dan mengembangkan kecerdasan serta melatih dalam upaya membina ketrampilan selain itu juga guru memiliki tugas memanusawi yaitu membina siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan martabat dirinya dan kemampuan memanusawi yang optimal serta pribadi yang mandiri, sehingga suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur (Ahmedi, 1997:52).

Guru adalah penyuluh dan pembimbing kearah masa depan yang lebih baik serta penggerak kearah kemajuan. Tugas-tugas guru ini akan ringan dan dapat berjalan secara baik pula apabila siswa taat dan hormat kepada guru. Taat pada peraturan yang dikeluarkan maupun taat pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh guru, sedangkan hormat disini lebih dimaksudkan agar siswa santun dan menghargai guru sebagai orang yang dijadikan panutan, terlebih pada waktu sedang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dikelas dengan cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran (Nana Sudjana, 2005:76).

Agar peraturan dapat terlaksana dengan baik perlu dilakukan upaya memasyarakatkan peraturan yang telah disepakati bersama sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak, yakinkan guru, siswa dan orang tua, bahwa aturan tersebut dapat

menumbuhkan disiplin warga sekolah, berilah kepercayaan kepada guru, staf administrasi untuk melaksanakan kedisiplinan sehari-hari, lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan dengan mengunjungi kelas, menjadi telada dengan berperilaku disiplin sesuai peraturan disetiap tempat dan waktu, segera atasi jika ada pelanggaran dengan menetapkan sanksi secara konsisten, dorong guru untuk memberikan peringatan jika tampak ada gejala penyimpangan dari siswa dan secara periodik dilakukan peninjauan kembali untuk mengetahui apakah peraturan tersebut masih cocok atau perlu penyempurnaan (PP, No. 19 Tahun 2005).

Untuk membantu meringankan tugas guru, perlu adanya kerja sama yang erat dan saling membantu antar orang tua siswa dan masyarakat. Kerja sama ini akan menimbulkan pengertian dan akan lebih membuka cakrawala pandang orang tua siswa tentang hal-hal

yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Dengan demikian beban tugas guru akan lebih ringan karena dengan sendirinya tugas kemasyarakatan yang diembannya akan terbagi dengan orang tua siswa.

Dampak positif lainnya yang dapat diperoleh adalah semakin serasinya fungsi pendidikan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Sebagai siswa tentu saja harus mengambil peranan dalam meningkatkan kerja sama, siswa harus menjadi tali penyambung antara orang tua dengan guru atau sebaliknya. Siswa juga harus mampu mendorong orang tua gar giat atau secara teratur mengadakan komunikasi dengan guru, keberhasilan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh keadaan situasi proses belajar mengajar. Karena itu semua kemampuan sangat penting bagi guru dalam mempersiapkan diri serta memahami dan membelajarkan paradigma masyarakat yang beraneka ragam karekter sehingga dapat

dan mampu untuk menyamakan persepsi yang berbeda-beda. (Djuju Sujana, 1996:25).

E. Kesimpulan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial, kita sebut juga sebagai satu organisasi yaitu terikat kepada tata aturan formal, berprogram dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan dalam menyelenggarakan yang resmi, pada akhirnya fungsi sekolah terikat kepada sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Di sekolah diajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma dimasyakat yang lebih luas, tidak hanya itu saja, di dalam sekolah individu dilatih untuk mempraktekan hal-hal yang ia pelajari di sekolah dan keluarga.

Sekolah dalam hubungan dengan keluarga, memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Karena itu menurut Karsidi,

beberapa usaha yang dilakukan terkait membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah. Serta membuat anak didik belajar lebih menaati peraturan. Peraturan sekolah dan mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, peran sekolah untuk mewujudkan kepemimpinan pancasila oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk disiplin siswa pada SMA Negeri 2 Sintang maka peran sekolah merupakan lembaga untuk mempersiapkan anak didalam kehidupannya, sekolah merupakan refleksi atau cermin kehidupan masyarakat sehingga sekolah tidak melupakan didi dari kenyataan-kenyataan didalam masyarakat, sekolah juga sebagai evaluator kondisi dimasyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan, sebagai lingkungan pengenti keluarga dan pendidik juga sebagai lembaga yang

menerima hak waris untuk mendidik anak jika anak tidak mempunyai keluarga.

Daftar Pustaka

- Djuju Sujana, 1996: 25, Peranan Kelurga dalam Lingkungan Masyarakat.
- Kaelen. MS. 2014, pendidikan Pancasila, Yogyakarta
- Namir, 1988:63, contoh metode Penelitian
- Sistem Pendidikan Nasional, UU. No. 20 Tahun 2003.
- Peraturan Pemerintah, No. 19 Tahun 2005).